

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian I. dan G.Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim R. dan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPM. Yogyakarta.
- Halim, A. 2008. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian untuk ilmu – ilmu sosial*. Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Karamoy, L.R. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Emba*. 1(3):939-948.
- Languju, V.G. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. 3(1):1044-1052.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit UPP STIM UKPM, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Meleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintah Di Indonesia*. Edisi Pertama. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan, D., dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

- Pangalila, M.C. 2015. Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. (15)14:366-377.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 *Pajak Daerah*. 3 Januari 2011. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 26 Oktober 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 *Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya*. 01 Desember 2008. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 26 Oktober 2007. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Standart Akuntansi Pemerintah*. 13 Juni 2005. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. 28 Agustus 2008. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta.
- Rahmawati., M. Mumpuni, dan S. Djamaluddin. 2012. *Akuntansi Bendaharawan Pemerintah Daerah/Kota*. Penerbit DEEPUBLISH, Surakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Tamboto, A. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah. *Jurnal Emba*. 3(4):671-679.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.



